

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : R.175	Tingkat Keamanan : SR/R/T/B
Tanggal Penerimaan : 3/9/2021	Tingkat Kecepatan : K/SS/S/B
Tanggal dan Nomor Surat : 31/8/2021 2945/-072	
Dari : Kadiskominfo Prov. DKI Jakarta	
Kepada : Ka. BSSN	
Tembusan : -	
Ringkasan isi : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah T.A. 2020.	
Jumlah : 47 lembar	

Kepada	Disposisi
1	2
<div>YTH SU</div> <div>Yth D3 D2</div> <div>Plt. D32</div>	<div>C-1 MUDK 3/9/2021</div> <div>C-2 Mudk 1/09/2021</div> <div>C-3 <div>- Pelajari sbg bhn evaluasi</div><div>- Buat analisis kebut SDM sesuai saran dan komunikasikan/koord dgn Pusbang SDM BSSN//060921</div></div>

EKS-1520



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G Lt. 3 dan 13
Telepon (021) 3823355 Faksimile (021) 3848850 dan (021) 3823253
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Nomor : 2945 / - 072
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian
Pemerintah Daerah T.A. 2020

31 Agustus 2021

Kepada :
Yth. Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara

di
Jakarta

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021 tentang Permintaan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah T.A. 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Raimania
NIP. 1972040619980320006

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta bahwa pelaksana urusan persandian dilaksanakan oleh Bidang Siber dan Sandi berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas menyelenggarakan layanan siber dan sandi serta keamanan informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Siber dan Sandi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyusunan arsitektur keamanan siber dan sandi serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan literasi dan asistensi penerapan SMPI;
- g. pelaksanaan literasi dan asistensi pengendalian keamanan siber dan sandi;
- h. pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;
- i. pelaksanaan asistensi hardening keamanan sistem elektronik;
- j. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
- k. pelaksanaan audit SMKI dan keamanan SPBE;
- l. pelaksanaan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- m. pelaksanaan layanan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan pengelolaan perangkat teknologi keamanan informasi dan sarana pendukung di Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan pengelolaan Security Operation Center (SOC) siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- p. pelaksanaan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;
- q. pelaksanaan jaring komunikasi sandi;
- r. pelaksanaan perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- s. pelaksanaan perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;

- t. pelaksanaan forensik digital, penanggulangan pemulihan dan proteksi keamanan sistem elektronik;
- u. pelaksanaan layanan pointing nama domain dan subdomain bagi lembaga sesuai dengan standar keamanan informasi;
- v. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tahun 2020, merupakan tahun pertama Bidang Siber dan Sandi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk. Banyak tantangan yang dihadapi sebagai Unit Kerja yang menggawangi urusan persandian dan merupakan bagian dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Selain pada tingkat Provinsi, urusan persandian juga diturunkan pada tingkat Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan struktur pengampunya setingkat Seksi.

Mewabahnya Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang mulai menjadi pandemi di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020 merubah pola hidup yang ada dimasyarakat, termasuk dengan cara bekerja para pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adanya kebijakan *Work From Home* seiring dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah mengharuskan sebagian besar para pekerja bekerja dari rumah. Salah satu pelayanan yang disediakan oleh untuk mendukung *Work From Home* (WFH) adalah pelayanan penyediaan *Virtual Private Network* (VPN), tentunya dengan adanya pemanfaatan ini sangat memungkinkan para pekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja dari rumah tanpa mengurangi kualitas pelayanan seperti pada kondisi normal sebelum pandemi.

Kondisi pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang ada pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk untuk mendukung kegiatan persandian. Penganggaran yang telah direncanakan sebelumnya untuk mendukung urusan persandian diberberapa mata anggaran terkena refocusing anggaran, sehingga terjadi penurunan anggaran dari yang telah direncanakan.

Ditengah keterbatasan dan tantangan yang ada, dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi terkait urusan persandian. Terselenggaranya audit Persandian dan assessment CSM yang dilaksanakan oleh BSSN juga membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memantau pelaksanaan persandian, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan urusan persandian agar menjadi lebih baik lagi.

JakartaProv-CSIRT pada tahun 2020 juga telah berhasil diresmikan langsung oleh BSSN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunjuk menjadi sebagai salah satu Pilot Project dari Pemerintah Daerah oleh BSSN dalam pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT). Asistensi yang diberikan oleh BSSN sampai dengan terselenggaranya

launching JakartaProv-CSIRT sangat membantu, sehingga diharapkan dapat terus terjalin dengan baik dengan urusan persandian lainnya.

Dalam mencapai tujuan Bidang Persandian telah didukung dengan sumber daya yang ada dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Siber dan Sandi dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif serta dukungan yang maksimal dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membantu Bidang Siber dan Sandi untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Arika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
A. Dasar Hukum	7
B. Tujuan	7
BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020	9
A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	9
B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan	10
1. Seksi Tata Kelola	10
2. Seksi Layanan Keamanan Informasi	11
3. Seksi Pengendalian Siber dan Sandi	11
C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah	12
BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2021	13
A. Seksi Tata Kelola	13
B. Seksi Layanan Siber dan Sandi	14
C. Seksi Pengendalian Siber dan Sandi	14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	17

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X - (khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat)

LAMPIRAN XI – DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II
HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

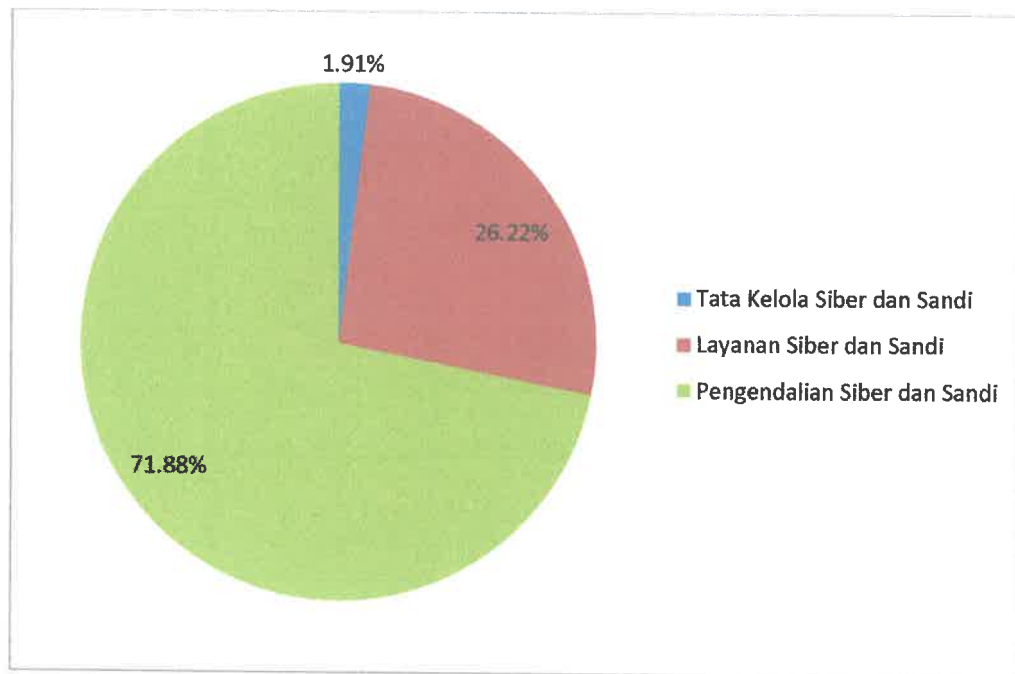
Pada tahun 2020, Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Siber dan Sandi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memiliki 10 kegiatan pada 1 program kerja. Sesuai dengan data pada Tabel 1 di bawah ini, kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup layanan siber dan sandi memiliki jumlah kegiatan yang paling banyak yaitu 6 (enam) kegiatan. Dari 10 (sepuluh) kegiatan yang direncanakan, terdapat 6 (enam) kegiatan dapat terlaksana atau dengan capaian 88,02%, sementara 4 (empat) kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat refocusing anggaran pada DPA Bidang Siber dan Sandi Diskominfo Provinsi DKI Jakarta dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang terjadi hingga saat ini.

Tabel 1 Realisasi Kegiatan Bidang Siber dan Sandi

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Tata Kelola Siber dan Sandi	3	1	59,52%
2	Layanan Siber dan Sandi	6	2	58,03%
3	Pengendalian Siber dan Sandi	1	1	99,72%
Total		10	6	88,02%

Tabel 2 Realisasi Anggaran Kegiatan Bidang Siber dan Sandi Tahun 2020

No	Ruang Lingkup	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tata Kelola Siber dan Sandi	195.594.000	116.415.000	59,52%
2	Layanan Siber dan Sandi	2.688.680.590	1.560.258.400	58,03%
3	Pengendalian Siber dan Sandi	7.371.520.310	7.350.640.000	99,72%
Total		10.255.794.900	9.027.313.400	88,02%



Gambar 1 Diagram Perbandingan Alokasi Anggaran Bidang Siber dan Sandi

Sesuai dengan Tabel 2 dan Gambar 1 di atas, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Siber dan Sandi memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp.7.371.520.310 atau (71,88%) dari total anggaran, anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan Tata Kelola Siber dan Sandi sebesar Rp.195.594.000 atau (1,91%) dari total anggaran dan anggaran untuk kegiatan Layanan Siber dan Sandi sebesar Rp.2.688.680.590 atau (26,22%) dari total anggaran. Dengan demikian alokasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pada seksi Tata Kelola Siber dan Sandi memiliki alokasi anggaran yang paling kecil di bandingkan dengan 2 seksi lainnya.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

1. Seksi Tata Kelola

Untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan siber dan sandi, pada tahun 2020 Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 3 di bawah ini yaitu:

Tabel 3 Kegiatan Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Belanja Sertifikasi	110.000.000	97.900.000	89,00%
2	Belanja Makanan dan Minuman peserta/petugas/panitia	28.394.000	3.715.000	13,08%
3	Belanja Tenaga ahli/instruktur/narasumber	57.200.000	14.800.000	25,87%

2. Seksi Layanan Keamanan Informasi

Untuk mendukung peningkatan kualitas Layanan Siber dan Sandi, pada tahun 2020 Seksi Layanan Siber dan Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 4. di bawah ini yaitu:

Tabel 4 Kegiatan Seksi Layanan Siber dan Sandi

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Belanja Tenaga Ahli/instruktur/Narasumber	1.626.600.000	1.548.000.000	95,17%
2	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak	599.770.688	0	0,00%
3	Belanja Modal Pengadaan ohp/Infocus/LCD/TV/HDTV	125.699.200	0	0,00%
4	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.339.040	12.258.400	99,35%
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Laptop	311.523.696	0	0,00%
6	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.747.966	0	0,00%

3. Seksi Pengendalian Siber dan Sandi

Untuk mendukung peningkatan kualitas pengendalian siber dan sandi, pada tahun 2020 Seksi Pengendalian Siber dan Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 5 di bawah ini yaitu:

Tabel 5 Kegiatan Seksi Pengendalian Siber dan Sandi

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7.371.520.310	7.350.640.000	99,72%

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel 6 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tata Kelola Siber dan Sandi Terdapat kendala berupa refocusing anggaran dikarenakan situasi Covid 19 sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dijalankan	Anggaran tersebut diajukan lagi di tahun berikutnya
2	Layanan Siber dan Sandi Terdapat kendala berupa refocusing anggaran dikarenakan situasi Covid 19 sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dijalankan	Anggaran tersebut diajukan lagi di tahun berikutnya
3	Pengendalian Siber dan Sandi -	

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2021

A. Seksi Tata Kelola

Penganggaran yang telah direncanakan untuk Tahun Anggaran 2021 pada Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi (tabel 7) meliputi penganggaran untuk Penyusunan dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Keamanan Informasi, Pengadaan Sarpras Pendukung Keamanan Ruangan, Surveillance ISO 27001, Security Awareness.

Security awareness dan surveillance ISO 27001 merupakan anggaran yang juga dianggarkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan, Penyusunan dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Keamanan Informasi dianggarkan dalam rangka pembuatan arsitektur SPBE pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Arsitektur SPBE yang mengacu kepada SPBE Nasional.

Tabel 7 Kegiatan Seksi Tata Kelola Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi	517.543.421	
	- Penyusunan dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Domain Keamanan Informasi	197.340.000	April s.d September 2021
	- Pengadaan Sarpras Pendukung Keamanan Ruangan	23.103.421	Maret s.d Mei 2021
	- Surveillance ISO 27001 Ruang Lingkup "Operasional Perangkat Keamanan Jaringan"	112.750.000	Juli s.d November 2021
	- Surveillance ISO 27001 Ruang Lingkup "Infrastruktur Pendukung Data Center"	112.750.000	Agustus s.d Oktober 2021
	- Narasumber Arsitektur SPBE Domain Keamanan Informasi	14.400.000	Juni s.d September 2021
	- Security Awareness	57.200.000	Februari s.d Desember 2021

B. Seksi Layanan Siber dan Sandi

Pada tahun 2021 rencana kegiatan Seksi Layanan Siber dan Sandi dapat dilihat pada Tabel 8, yaitu Penataan, Pengembangan dan Layanan Security Network System. Untuk meningkatkan layanan e-Government secara konsisten, cepat dan aman dalam mengelola keamanan jaringan komunikasi data milik Pemprov DKI Jakarta bisa berjalan dengan optimal, maka diperlukan Pengadaan Tenaga Ahli sebagai upaya untuk meningkatkan standar tata kelola TIK dalam dan untuk menunjang produktivitas kerja serta memberikan identitas tenaga ahli diperlukan pengadaan pakaian kerja, serta Pengadaan Lisensi Antivirus menyediakan dukungan pemeliharaan aplikasi anti virus selama masa aktif lisensi 1 (satu) tahun, sehingga dapat mengantisipasi serangan virus atau *malware* dan mendapatkan *update patch* terbaru serta peningkatan kinerja semua layanan yang disediakan secara operasional berjalan dengan optimal.

Tabel 8 Kegiatan Seksi Layanan Siber dan Sandi Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Penataan, Pengembangan dan Layanan Security Network System	2.125.310.400	
	- Pengadaan Tenaga Ahli	1.893.000.000	Januari s.d Desember 2021
	- Renewal Lisensi Antivirus	219.090.000	Februari s.d Maret 2021
	- Pengadaan Pakaian Kerja	13.220.400	Februari s.d Maret 2021

C. Seksi Pengendalian Siber dan Sandi

Pada tahun 2021 rencana kegiatan Seksi Pengendalian Siber dan Sandi dapat dilihat pada Tabel 9, yaitu Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System. Untuk meningkatkan performa dan keamanan dari aplikasi-aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diakses dengan performa yang baik dan aman dari serangan-serangan baik di level network ataupun aplikasi maka diperlukan pengadaan perangkat keras *application delivery and security*, perangkat keras *domain names service & content delivery network*, perangkat keras Efficient IP serta untuk menunjang pengamanan aplikasi dan mengoptimalkan performa keamanan aplikasi yang ada dibutuhkan pengadaan SSL Certificate.

Tabel 9 Kegiatan Seksi Pengendalian Siber dan Sandi Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System	13.887.173.307	
	- Pengadaan Perangkat Keras Application Delivery and Security	9.075.000.000	April s.d September 2021
	- Pengadaan Perangkat Keras Domain Names Service & Content Delivery Network	3.955.600.000	Mei s.d Oktober 2021
	- Pengadaan Perangkat Keras Efficient IP	808.352.057	Juni s.d Oktober 2021
	- Pengadaan SSL Certificate	48.221.250	Agustus s.d Oktober 2021

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Pengajuan anggaran Bidang Siber dan Sandi pada tahun 2020 mengajukan anggaran kegiatan sebanyak Rp.10.255.794.900 diterima sebanyak Rp.10.255.794.900.
2. Pencapaian indikator kinerja utama Bidang persandian Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah adalah 88,23%.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Security Awareness* kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tema:
 - a. Implementasi Tanda Tangan Digital Pada Sistem Aplikasi Berbasis Elektronik dan Integrasi dengan Server Client berbasis API Service
 - b. *Step By Step* Aplikasi Client esign.jakarta.go.id
 - c. *Information Security Management & Governance*
 - d. *Maximizing Threat Hunting* (SOC)
 - e. *Artificial Intelligence of Things* (AIoT) & Data Architecture
 - f. *Data Management & Governance toward Data Integration*
4. Pelaksanaan layanan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah sebanyak:
 - a. Penerbitan Sertifikat Elektronik sebanyak 351 user.
 - b. Interkoneksi/integrasi aplikasi sistem elektronik ke server esign BSR E BSSN
5. Pengadaan perangkat keamanan jaringan, yaitu:
 - a. Virtual Machine
 - b. Firewall
6. Penyusunan regulasi urusan persandian, yaitu:
 - a. Instruksi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pengumpulan Data Dan Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik
 - b. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang *Computer Security Incident Response Team* Provinsi DKI Jakarta (Jakarta-CSIRT)
7. Penggunaan Secure Mail Sanapati
 - a. Jumlah kawat surat masuk sebanyak 607 email
 - b. Jumlah kawat surat keluar sebanyak 68 email

8. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) <https://soc.jakarta.go.id>
9. Penanganan insiden Keamanan Informasi;
 - a. Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan Sistem Elektronik
 - b. Penyelenggaraan internet sehat melalui web filtering dan pembatasan waktu (block konten negatif dan pembatasan sosmed ketika jam kerja)
 - c. Pengamanan web informasi dan aplikasi
 - d. Konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan
 - e. Security Monitoring Harian

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Bidang Siber dan Sandi bersaran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:
 - a. Menyelenggarakan Sosialisasi Permendagri nomor 90 tahun 2019 urusan persandian kepada penyelenggara persandian di Pemerintah Daerah;
 - b. Menginstruksikan.
2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:
 - a. Memberikan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan keamanan informasi bagi pemerintah daerah;
 - b. Memberikan sarana dan sarana pendukung (perangkat keras dan perangkat lunak) serta petunjuk penggunaannya bagi Pemerintah Daerah yang menangani urusan siber dan persandian, seperti: Material Sandi, Jaring Komunikasi Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian;
 - c. Memberikan Sosialisasi Security Awareness tentang Siber dan Persandian bagi Kepala Daerah;
 - d. Menyiapkan Regulasi/Peraturan Urusan Persandian bagi Pemerintah Daerah;
 - e. Menambah kuota peserta diklat yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan terdapat fungsi persandian di tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - f. Memfasilitasi pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) urusan persandian;
 - g. Memberikan pedoman-pedoman teknis yang dimiliki oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dapat diimplementasikan di tingkat Pemerintah Daerah;
 - h. Meningkatkan kinerja aplikasi esign cloud;
 - i. Menambah kuota personil verifikator yang ada pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

RAHASIA

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - / Tahun
1	Peraturan Kepala Daerah			
	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	a. Kebijakan dalam penyelenggaraan keamanan informasi Pemerintah Daerah b. Penataan pola hubungan komunikasi sandi c. Pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemerintah Daerah d. Pengelolaan sumber daya persandian untuk pengamanan informasi e. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi	2018	
	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2018 Penggunaan sertifikat elektronik	a. Penyelenggaraan Sertifikat elektronik b. Pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE c. Tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik d. Masa berlaku Sertifikat Elektronik	2018	

		<p>e. Kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik</p> <p>f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi</p>		
2	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta			
	Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2018 tentang Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik	Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik dalam rangka penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis tanda tangan elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik pada mekanisme disposisi Gubernur kepada para Pejabat Eselon I dan Eselon II	2018	
	Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 50/SE/2018 Tentang Kebijakan Penggunaan Intranet dan Internet Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Kebijakan Penggunaan Intranet dan Internet Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2018	
	Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 31/SE/2019 tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Kebijakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2019	

	Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 79/SE/2019 Tentang Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Media Komunikasi atau Media Sosial Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kebijakan Penyebarluasan Informasi Elektronik Melalui Media Komunikasi atau Media Sosial Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	2019	
	Instruksi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pengumpulan Data dan Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik	Pengumpulan Data dan Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik untuk tanda tangan elektronik dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penggunaan sertifikat elektronik berupa tanda tangan elektronik.	2020	
	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang <i>Computer Security Incident Response Team</i> Provinsi DKI Jakarta (Jakarta-CSIRT)	Pembentukan Computer Security Incident Response Team Provinsi DKI Jakarta (Jakarta-CSIRT)	2020	
3	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta			
	a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Seksi persandian dan Sistem Keamanan Data	a. Permohonan Pembuatan Domain/Subdomain b. Permohonan Instalasi Antivirus c. Permohonan Investigasi Forensik Keamanan Aplikasi Berbasis Web d. Permohonan Keamanan Aplikasi Berbasis Web e. Permohonan Akses VPN (<i>Virtual Private Network</i>)	2017	

		f. Keamanan Kata Sandi		
	b. SK No 9 Tahun 2019 tentang <i>Computer Security Incident Response Team</i> Provinsi DKI Jakarta (CSIRT)	Pembentukan tim penanganan respon insiden keamanan informasi di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta	2019	
	c. SK No 23 Tahun 2019 SOP Penggunaan Sertifikat Elektronik	a. Penerbitan Sertifikat Elektronik OSD LU Kelas 2 untuk individu menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) b. Penerbitan Sertifikat Elektronik OSD LU Kelas 2 untuk aplikasi/sistem menggunakan Aplikasi Manajemen Sertifikat (AMS) c. Prosedur Pembaruan Sertifikat Elektronik OSD LU Kelas 2 dengan penggantian pasangan kunci menggunakan aplikasi manajemen sertifikat (AMS) d. Pencabutan sertifikat elektronik OSD LU Kelas 2 untuk individu menggunakan aplikasi manajemen sertifikat (AMS) e. Pencabutan sertifikat elektronik OSD LU Kelas 2 untuk individu menggunakan aplikasi manajemen sertifikat (AMS) oleh Admin f. Perubahan sertifikat elektronik OSD LU Kelas 2 untuk individu menggunakan aplikasi manajemen sertifikat (AMS)	2019	

		g. Reset Password akun aplikasi manajemen sertifikat (AMS) h. Pendaftaran dan pembuatan akun aplikasi manajemen sertifikat (AMS) i. Helpdesk layanan j. Hilang sertifikat Elektronik k. Lupa Passphrase l. Pengaduan layanan sertifikat elektronik		
	d. SK No. 19 Tahun 2020 tentang Tim Keamanan Informasi ISO 27001:2013	Pembentukan Tim Keamanan Informasi dalam rangka ISO 27001:2013 dengan Ruang Lingkup Operasional Perangkat Keamanan Jaringan	2020	
	e. SK No. 21 Tahun 2020 tentang <i>Tim Business Continues Plan</i> (BCP)	Pembentukan tim BCP dalam perencanaan kelangsungan bisnis strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal	2020	
	f. SK No. 29 Tahun 2020 Tim Keamanan Informasi ISO 27001:2013	Pembentukan Tim Keamanan Informasi dalam rangka ISO 27001:2013 dengan Ruang lingkup Infrastruktur Operasional Pendukung Pusat Data	2020	
	g. SK No. 3 Tahun 2020 <i>Tim Business Continues Plan</i> (BCP)	Pembentukan tim BCP dalam perencanaan kelangsungan bisnis strategi yang diciptakan untuk mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal (Pusat Data)	2020	

	h. SK No. 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT)	Pembentukan susunan <i>Computer Security Incident Response Team</i> Provinsi DKI Jakarta	2020	
--	--	--	------	--

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM SANDI

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
1	R.Boedi Setiawan	021. 3823257	boedi@jakarta.go.id
2	Tony Yudianto Pribadi	021. 3823257	yudianto@jakarta.go.id
3	Rycan Fahmi	021. 3823257	rycan@jakarta.go.id
4	Samsu	021. 3823257	samsue@jakarta.go.id
5	Arif Buchari Marpaung, S.Kom	021. 3823257	arifbucharimarpaung@jakarta.go.id
6	Andrie Yuswanto	021. 3823257	aan_post@jakarta.go.id
7	Andy Susanto	021. 3823257	andysusanto@jakarta.go.id
8	Tanti Widyaningrum	021. 3823257	tanti@jakarta.go.id
9	Lamria Simatupang	021. 3823257	lamria@jakarta.go.id
10	Reihan Adinata	021. 3823257	reihan.adinata@jakarta.go.id
11	M. Taufik Hidayat	021. 3823257	taufik.hidayat@jakarta.go.id
12	Venny Yulianty	021. 3823257	Venny@jakarta.go.id

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT		JABATAN	TMT	
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	197009171998031006	IV/B	04	2021	Kepala Bidang Siber dan Sandi	01	2020
2	198202272010011020	Penata/IIIC	04	2018	Kepala Seksi Layanan Siber dan Sandi	01	2020
3	198501032011011013	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Layanan Siber dan Sandi	02	2020
4	197704282006041020	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Layanan Siber dan Sandi	02	2021
5	198801132015041002	Penata Muda Tingkat 1/IIIB	04	2019	Pengolah Layanan Siber dan Sandi	02	2021
6	197812312011011014	Penata Tingkat 1/IIID	04	2021	Kepala Seksi Pengendalian Siber dan Sandi	01	2020
7	198107282011011005	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Pengendalian Siber dan Sandi	02	2020
8	198504012010012038	Penata/IIIC	04	2018	Pranata Komputer Ahli Muda (JFT)	12	2018
9	198601272011012009	Penata Muda / IIIA	04	2018	Pranata Komputer Ahli Pertama (JFT)	12	2018
10	198510132010011020	Penata Tingkat 1/IIID	04	2021	Kepala Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi	01	2020
11	197610192007011009	Penata Muda / IIIA	04	2018	Pengolah Tata Kelola Siber dan Sandi	05	2021
12	198507192014032002	Penata Muda Tingkat 1/IIIB	04	2018	Pranata Komputer Pertama (JFT)	12	2018

C. DATA PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN		PELATIHAN DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI/PERSANDIAN		SERTIFIKASI DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI	
	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	S1	1996	Pelatihan Teknis Keamanan Siber Bagi Pimpinan	2021		
2	S1	2004	Diklat Sandiman	2019		
3	S2	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kriptografi Asimetrik Teknis LEMBAGA SANDI NEGARA - Diklat Sandiman - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 - 2019 - 2021 		
4	S1	2002	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	2021		
5	S1	2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Cyber Security Essential - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah 	2021		
6	S2	2004	- Pelatihan Teknis Keamanan Siber Bagi Pimpinan	2019		
7	S2	2020	- Diklat Sandiman	- 2019		

			- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	- 2021		
8	S2	2017	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2019 - 2021		
9	S1	2016	- Diklat Sandiman - Pelatihan Cyber Security Essential - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	- 2019 - 2021 - 2021		
10	S1	2007	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	2021		
11	S1	2014	- Diklat Sandiman - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2019 - 2021		
12	S1	2009	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2021 - 2021		

D. DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHARGAAN

NO	PENGHARGAAN PERSANDIAN ATAU KEAMANAN INFORMASI		TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN		TUGAS LAIN DILUAR URUSAN PERSANDIAN
	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN	DAPAT	TIDAK DAPAT	
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1					
2					
dst					

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmawati
NIP. 197204061998032006

FORM KELENGKAPAN PERSONIL SDM DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI (PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK)

A. DATA PRIBADI

NO	NAMA	NOMOR TELEPON (KANTOR)	EMAIL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	R.Boedi Setiawan	021. 3823257	boedi@jakarta.go.id
2	Tony Yudianto Pribadi	021. 3823257	yudianto@jakarta.go.id
3	Rycan Fahmi	021. 3823257	rycan@jakarta.go.id
4	Samsu	021. 3823257	samsoe@jakarta.go.id
5	Arif Buchari Marpaung, S.Kom	021. 3823257	arifbucharimarpaung@jakarta.go.id
6	Andrie Yuswanto	021. 3823257	aan_post@jakarta.go.id
7	Andy Susanto	021. 3823257	andysusanto@jakarta.go.id
8	Tanti Widyaningrum	021. 3823257	tanti@jakarta.go.id
9	Lamria Simatupang	021. 3823257	lamria@jakarta.go.id
10	Reihan Adinata	021. 3823257	reihan.adinata@jakarta.go.id
11	M. Taufik Hidayat	021. 3823257	taufik.hidayat@jakarta.go.id
12	Venny Yulianty	021. 3823257	Venny@jakarta.go.id

B. DATA PEKERJAAN

NO	NIP/NRP	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT		JABATAN	TMT	
			BULAN	TAHUN		BULAN	TAHUN
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	197009171998031006	IV/B	04	2021	Kepala Bidang Siber dan Sandi	01	2020
2	198202272010011020	Penata/IIIC	04	2018	Kepala Seksi Layanan Siber dan Sandi	01	2020
3	198501032011011013	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Layanan Siber dan Sandi	02	2020
4	197704282006041020	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Layanan Siber dan Sandi	02	2021
5	198801132015041002	Penata Muda Tingkat 1/IIIB	04	2019	Pengolah Layanan Siber dan Sandi	02	2021
6	197812312011011014	Penata Tingkat 1/IIID	04	2021	Kepala Seksi Pengendalian Siber dan Sandi	01	2020
7	198107282011011005	Penata/IIIC	04	2019	Analisis Pengendalian Siber dan Sandi	02	2020
8	198504012010012038	Penata/IIIC	04	2018	Pranata Komputer Ahli Muda (JFT)	12	2018
9	198601272011012009	Penata Muda / IIIA	04	2018	Pranata Komputer Ahli Pertama (JFT)	12	2018
10	198510132010011020	Penata Tingkat 1/IIID	04	2021	Kepala Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi	01	2020
11	197610192007011009	Penata Muda/ IIIA	04	2018	Pengolah Tata Kelola Siber dan Sandi	05	2021
12	198507192014032002	Penata Muda Tingkat 1/IIIB	04	2018	Pranata Komputer Pertama (JFT)	12	2018

C. DATA PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN		PELATIHAN DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI/PERSANDIAN		SERTIFIKASI DIBIDANG KEAMANAN INFORMASI	
	JENJANG	TAHUN LULUS	NAMA PELATIHAN	TAHUN	NAMA SERTIFIKASI	TAHUN
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	S1	1996	Pelatihan Teknis Keamanan Siber Bagi Pimpinan	2021		
2	S1	2004	Diklat Sandiman	2019		
3	S2	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kriptografi Asimetrik Teknis LEMBAGA SANDI NEGARA - Diklat Sandiman - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017 - 2019 - 2021 		
4	S1	2002	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	2021		
5	S1	2009	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Cyber Security Essential - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah 	2021		

6	S2	2004	- Pelatihan Teknis Keamanan Siber Bagi Pimpinan	2019		
7	S2	2020	- Diklat Sandiman - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	- 2019 - 2021		
8	S2	2017	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2019 - 2021		
9	S1	2016	- Diklat Sandiman - Pelatihan Cyber Security Essential - Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	- 2019 - 2021 - 2021		
10	S1	2007	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah	2021		
11	S1	2014	- Diklat Sandiman - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2019 - 2021		
12	S1	2009	- Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan	- 2021		

			Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah - Pelatihan Cyber Security Essential	- 2021		
--	--	--	--	--------	--	--

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Nika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA PALSAN	JUMLAH	NOMOR SERI	NUP	POSISI	PENGADAAN		BAST		KONDISI (B/R)	KESIAPAN OPS SO/TO	PENGGU NAAN (AG/TG)
						INSTANSI	THN	NOMOR	TANGGAL			
1	Laptop/ Notebook HP ProBook 4431s (pendukung Kriptosoft Pro)	1	LEMSANEG BMN 2012 / No : 3100102003.1 166		Diskominfotik	LEMSANEG	2012	VI/01/DKI- Pemprov/2 016	26 Agustus 2016	B	SO	
2	Secure Dongle Untuk Para Pengguna	5	ID : 357587D4 ID : 359583D5 ID : 3595ACED ID : 3597215E ID : 3597F25F		Diskominfotik & Perangkat Daerah	BSSN	2021	R.BA.04/B SSN/PP.06 .02/04/2021	08 April 2021	B	SO	
3	Secure USB (Padlock)	1	ID : B9D5E50A5B AD		Diskominfotik	BSSN	2021	R.BA.04/B SSN/PP.06 .02/04/2021	08 April 2021	B	SO	

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Anika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	SISAN	KUNCI SISTEM SANDI										KET
		MANUAL KEY		JML	PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			
		NAMA BUKU	NO.KUNCI		PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	TB	
1	Kriptosoft Pro	3201	14033	1	BSSN	2016	VI/01/DKI-Pemprov/2016	26 Agustus 2016			X	

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Arika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KON DISI	PENGUNAAN	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL	(B/R)	(AG/TG)	
1	Jammer HPRC 6 Bands	CNU12102T O	1166	1	Diskominfotik	BSSN		VI/01/DKI-Pemprov/2016	26 Agustus 2016	B	AG	
2	Signal Analyzer Model : PBSA - 8G	A516402219	66	1	Diskominfotik	BSSN		R.BA.238/BSSN/PP.06.02/12/2019	9 Desember 2019	B	AG	

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmama
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA SISTEM ELEKTRONIK	KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK (STRATEGIS/TI NGGI/RENDAH)	PENGELOLA SISTEM ELEKTRONIK	BENTUK PENGAMANAN MINIMAL YANG SUDAH TERPASANG*	UJI KEAMANAN SISTEM ELEKTRONIK		PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL UJI (DALAM BENTUK PERSENTASE)		
					PELAKSANA	TAH UN	TELA H	SEDAN G	BELUM
1	ptsp.jakarta.go.id	Strategis	DPMPSTP	Firewall, SSL	Diskominfo	2020			V
2	apbd.jakarta.go.id	Strategis	BPKD	Firewall, SSL	Diskominfo	2020			V
3	jakpreneur.jakarta.go.id	Strategis	Dinas PPKUKM	Firewall, SSL	BSSN	2020			V
4	alpukat-dukcapil.jakarta.go.id	Strategis	Dinas Dukcapil	Firewall, SSL	Diskominfo	2020			V
5	sijaki.jakarta.go.id	Tinggi	Diskominfo	Firewall, SSL	Diskominfo	2020	100%		
6	pelaporancovid19.jakarta.go.id	Strategis	Dinas Kesehatan	Firewall, SSL	Diskominfo	2020			V
7	eoffice.jakarta.go.id	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Firewall, SSL	BSSN	2020			V

8	csirt.jakarta.go.id	Tinggi	Diskominfotik	Firewall, SSL	BSSN	2020	100%		
---	---------------------	--------	---------------	---------------	------	------	------	--	--

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Alika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1	Klasifikasi Informasi	V		Keputusan Kadis Kominfotik Nomor 36 Tahun 2019	2019	-
2	Jadwal Retensi Arsip	V		Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004	2004	-
3	Pemusnahan Arsip	V		Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004	2004	-
4	Permintaan Informasi/Dokumen	V		Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	2016	-
5	Distribusi informasi/dokumen	V		Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	2016	-

2. Pemusnahan Dokumen

No.	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksana Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1				

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1	Layanan literasi Keamanan Informasi	2020		ASN dan Non ASN	Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
2	Layanan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
3	Layanan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
4	Layanan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah	2020		ASN dan Non ASN	Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
5	Layanan pengelolaan Security Operation Center (SOC) siber dan sandi Pemerintah Daerah	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
6	Layanan jaring komunikasi sandi	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
7	Layanan perlindungan informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
8	Layanan perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
9	Layanan forensik digital dan proteksi keamanan sistem elektronik	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta

10	Layanan pointing nama domain dan subdomain bagi lembaga sesuai dengan standar keamanan informasi	2020			Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta
----	--	------	--	--	---

Keterangan:

* Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

** Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

*** Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1	Email Sanapati	Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	email	Perangkat BSSN
2	VPN	Perangkat Daerah yang mengajukan Permohonan akses	Akses Virtual	Perangkat F5

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Afrika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

RAHASIA

LAMPIRAN X*

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1	Aplikasi Naskah Dinas Elektronik https://eoffice.jakarta.go.id	Sebagian (Belum semua)	√	Sebagian (Belum semua)	Firewall, SSL	√	√	√	√

*(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat)

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP. 197204061998032006

LAMPIRAN XI

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Administrasi a. Sarana Pengolah Data - Desktop - Laptop - Scanner b. Sarana Penyimpanan Data - Hardisk - Flashdisk - CD - Box File - Brankas - Filling Cabinet - Lemari c. Sarana Komunikasi - Telepon - Faksimili - Sarana Internet - Radio d. Sarana Pencetak - Printer - Mesin Foto Copy e. Sarana Tulis Menulis - Ballpoint - Pensil - Penghapus - Spidol - Buku Kerja - Papan Tulis f. Sarana Penghancur Data - Alat Penghancur Kertas - Palu - Sarana Pembakaran - Gunting	6 unit 1 unit 1 unit 5 unit - 50 keping 15 box - 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 87 pcs 13 pcs 4 pcs 70 pcs - 1 unit - 1 buah - 3 buah	Baik Baik Rusak 4 Baik, 1 Rusak - Baik Baik - Baik Baik Baik Baik 1 Baik, 1 Rusak Rusak Baik Baik Baik Baik - Baik - Baik
2	Sarana Kerja Kasa - Bahan Sandi - Telepon SLJJ - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon	1 unit - 1 unit 8 unit 1 unit	Baik - Baik Baik Baik
3	Sarana Strong Room - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) - Monitor CCTV	1 unit - 1 unit	Baik - Baik

4	Sarana Pendukung		
	- Meja Kerja	35 unit	Baik
	- Kursi Kerja	32 unit	Baik
	- Generator Listrik	Ada	Baik
	- Penerangan darurat	Ada	Baik
	- Pengatur Suhu	Ada	Baik
	- Genset Portable	Ada	Baik
	- Tempat Sampah	4 pcs	Baik
5	- Kalender	4 pcs	Baik
	- Jam dinding	2 unit	Baik
	Sarana Pengamanan Fisik		
	a. Pengamanan Akses Kontrol		
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN)	3	Baik
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token)	-	-
	- Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan)	3 unit	Baik
	- Tanda pengenal (ID card)	17 pcs	Baik
	b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran		
	- Sensor Pendeteksi Api (fire detector)	Ada	Baik
	- Alarm Kebakaran	Ada	Baik
	- Automatic Sprinkler System	20 unit	Baik
	- Tabung Pemadam Api	4 unit	Baik
	c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup		
	- Kamera Monitor (CCTV)	4 unit	Baik
	- Piket Jaga	Ada	Baik

Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

